



# LAYANAN KEUANGAN DIGITAL JADI KUNCI INKLUSI KEUANGAN

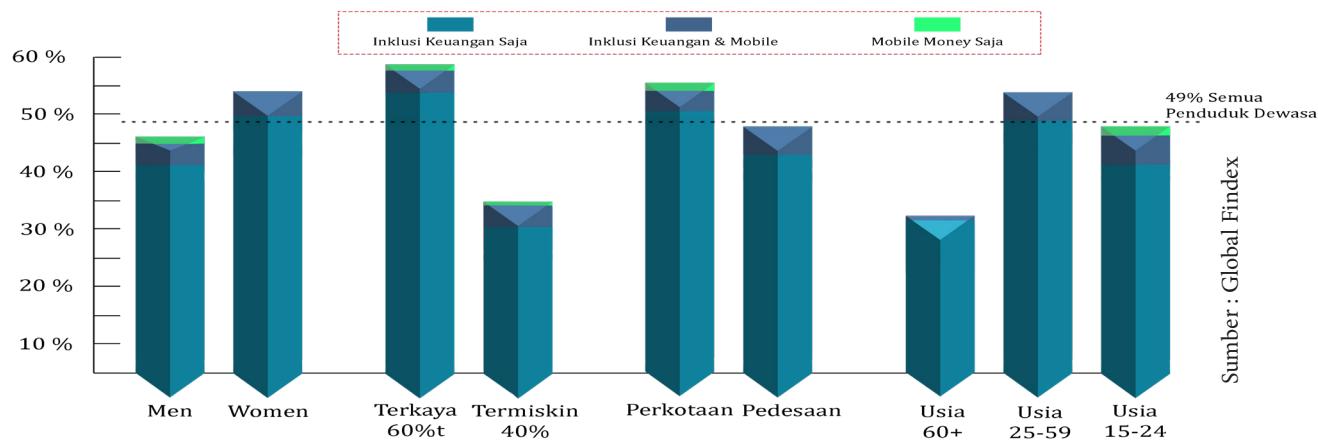
JAKARTA, 18 Juli 2018. Laporan Global Findex dari Bank Dunia terkait keuangan inklusif Indonesia tahun 2017 menunjukkan 48,9% atau 92 juta penduduk dewasa telah memiliki rekening. Penjabaran metodologi dan poin-poin penting dari laporan Global Findex ini disampaikan dalam acara Workshop The Global Findex Database yang mengusung tema *"Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution 2017"*.

Hadir dalam workshop ini Pungky P. Wibowo selaku Direktur Eksekutif Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional, Bank Indonesia yang memberikan kata sambutan untuk membuka acara. Menurut Pungky pemerintah sangat berkomitmen untuk mewujudkan keuangan inklusif di Indonesia, yang ditargetkan 75% sampai akhir tahun 2019. Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 menjadi pedoman bagi Pemerintah dalam bergerak mencapai tujuan tersebut. Pembentukan

Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang beranggotakan berbagai kementerian/lembaga diharapkan dapat berko-laborasi bersama secara efektif demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui keuangan inklusif.

Leora Klapper, selaku Led Economist in the Finance and Private Sector Resarch Team of the Development Research Group dari Bank Dunia, mengawali paparannya dengan perbandingan kondisi keuangan inklusif antar negara di Asia. Sejak tahun 2014, negara dengan jumlah peningkatan kepemilikan rekening tertinggi di kawasan Asia Tenggara adalah Indonesia yaitu mencapai 13%. Sedangkan negara tetangga Malaysia mengalami peningkatan sebanyak 5% sejak tahun 2014 hingga 2017. Definisi rekening sendiri menurut Bank Dunia harus memiliki tiga fungsi, yaitu *"saving, transfer, and payment"* ungkap Leora. Termasuk di dalamnya rekening uang elektronik teregister maupun mobile money dengan basis operator telekomunikasi.

## Kepemilikan Rekening di Indonesia Total Presentasi Penduduk Dewasa



Data Global Findex menemukan bahwa kepemilikan akun rekening masyarakat Indonesia lebih didominasi kaum perempuan, artinya tidak ada gap gender seperti yang terjadi di banyak negara lain. Adanya gap sebesar 20% justru terjadi antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dengan penghasilan rendah.

Faktor penghambat tertinggi kepemilikan rekening oleh masyarakat adalah “beralasan tidak memiliki uang”. Kemudian disusul faktor jarak institusi keuangan yang jauh, mahalnya biaya rekening, kekurangan dokumen persyaratan, serta sudah adanya anggota keluarga yang memiliki rekening. Sehingga masih banyak masyarakat yang menyimpan uangnya di lembaga semiformal maupun nonformal, seperti koperasi dan tabungan arisan.

Adapun survei Global Findex ini dilakukan dengan kerjasama antara Bank Dunia dan Gallup World Poll (Gallup). Survei dilakukan secara acak kepada seseorang di berbagai wilayah Indonesia. Dengan mendatangi setiap rumah, pertanyaan diajukan petugas survei mulai dari daftar rumah tangga sampai dengan pertanyaan “apakah anda memiliki rekening?”. Survei dilakukan dalam waktu tiga puluh menit, menggunakan perangkat elektronik tablet.

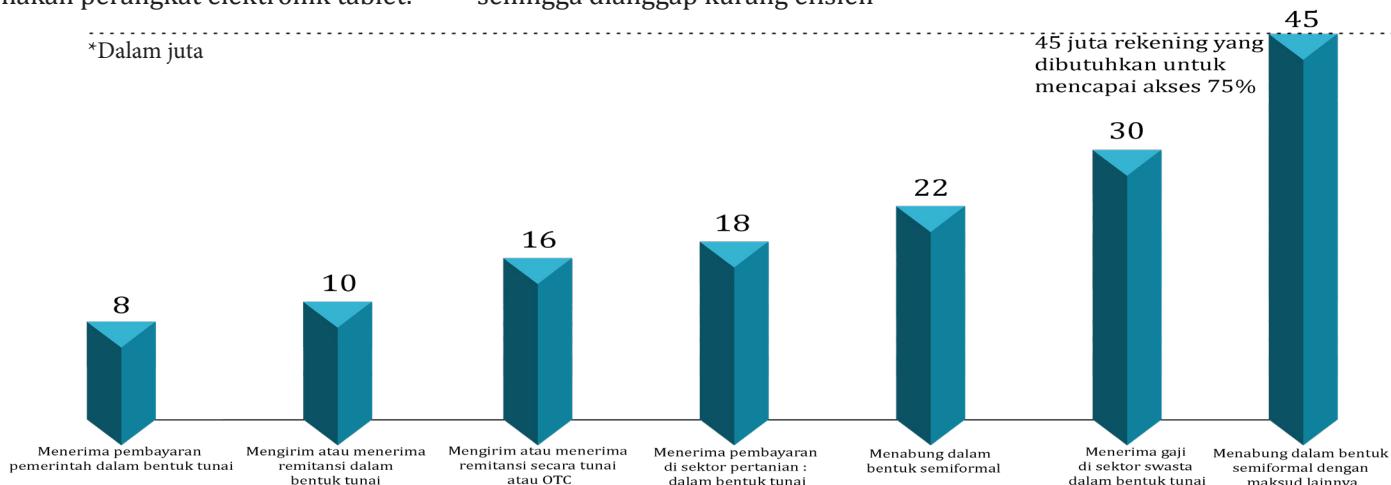
\*Dalam juta

Leora menyatakan “*Digital Inclusion is key to financial inclusion*”. Kemajuan dalam layanan keuangan digital, dimulai dari pembayaran digital, termasuk tabungan, kredit, dan produk asuransi yang disampaikan melalui *platform* digital, adalah kunci untuk mencapai keuangan inklusif.

Menurut Leora, Indonesia cocok untuk menerapkan inklusi keuangan secara digital guna mencapai targetnya hingga akhir tahun 2019. Tercatat transaksi keuangan digital di Indonesia terus berkembang dan meningkat sebanyak 12% sejak tahun 2014. Ada 71% pemilik rekening di bank melakukan transaksi keuangan secara digital di tahun 2017. Sedangkan penduduk dewasa di Indonesia yang memiliki telepon selular juga cukup besar, yaitu mencapai 77%. Harapannya dengan layanan keuangan digital, dapat memangkas proses KYC (*Know Your Customer*) yang mengharuskan seseorang mendatangi kantor bank sehingga dianggap kurang efisien

dari segi waktu dan biaya. Untuk menerapkan layanan keuangan digital, kerjasama dan kolaborasi dengan perusahaan telekomunikasi sangat diperlukan guna interoperabilitas rekening dengan nomor telepon seluler. Kemajuan *fintech* di Indonesia juga memegang peran penting dalam memperluas layanan keuangan bagi masyarakat.

Data Global Findex juga memberi gambaran peluang untuk mengejar target keuangan inklusif 75%, yang saat ini masih membutuhkan kurang lebih 45 juta penduduk dewasa yang memiliki rekening. Catatan dari Global Findex terhadap masyarakat *unbanked* yang berpotensi untuk mewujudkan keuangan inklusif di Indonesia adalah sebagai berikut:



- 8 juta orang menerima pembayaran pemerintah dalam bentuk tunai;
- 10 juta orang mengirim atau menerima remitansi dalam bentuk tunai;
- 16 juta orang mengirim atau menerima remitansi dalam bentuk tunai atau OTC (*Over the Counter*);
- 18 juta orang menerima pembayaran agrikultur dalam bentuk tunai;
- 22 juta orang menabung dalam bentuk semiformal;
- 30 juta orang menerima gaji di sektor swasta dalam bentuk tunai;
- 45 juta orang menabung dalam bentuk semiformal dengan maksud lainnya.

Sebagai penutup dalam acara workshop ini, Eko Ariyanto selaku Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan menyimpulkan bahwa laporan Global Findex ini bisa dijadikan komparasi Kementerian/Lembaga dalam mengembangkan metodologinya masing-masing dalam membuat survei terkait keuangan inklusif. Eko juga kembali mengingatkan akan target keuangan inklusif 75% di akhir tahun 2019. “kita punya PR dalam 1,5 tahun targetnya kurang 45 juta penduduk yang memiliki rekening”.(RY)



*“Digital Inclusion is key to financial inclusion”.*



# Urgensi Menabung Sejak Dini

Oleh : Bagus Yaugo Wicaksono

Penggiat Perlindungan Anak

**M**enabung penting untuk dibiasakan bagi anak usia dini. Namun, apa untungnya? Dan apa kendala yang mungkin dihadapi kedepan? Tulisan ini secara ringkas menjawab pertanyaan tersebut.

## Anak: Pembelajar Natural

Anak telah mampu mengenali transaksi keuangan sejak masih balita. Mereka menandai aktifitas orang tuanya setiap hari seperti, belanja di pasar, bayar listrik dan lainnya. Perlahan-lahan anak memahami bahwa dalam hidup perlu uang. Ini dapat dilihat, salah satunya, dari penerimaan anak saat orang tuannya pergi bekerja. Namun pemahaman terhadap kebutuhan uang tidak terlalu berarti terhadap kemampuan anak dalam mengelola keuangan di masa depan.

Study Jorgensen dan Savla menunjukkan bahwa para remaja dari keluarga menengah keatas, meski mendapat pendidikan financial education yang cukup, cenderung tidak mampu memanfaatkan uang mereka dengan bijak. Ini berbeda dengan teman-temannya yang pernah berpengalaman dalam mengelola keuangan secara langsung. Mereka lebih mampu memanfaatkan rekening dan kartu kredit dengan baik. Studi ini sekaligus membuktikan bahwa literasi keuangan bukanlah pengetahuan yang bisa di transfer secara instan.

## Literasi Keuangan, Life Skill dan Urgensinya di Indonesia

Literasi keuangan telah berevolusi menjadi bagian dari keahlian hidup. Dengan pengetahuan ini, seseorang akan mampu mengoptimalkan jasa keuangan seperti, memahami manfaat dan resiko, fitur, biaya, hak dan kewajiban dari sebuah jasa keuangan. Namun sepertinya, nilai positif dari literasi keuangan belum bisa dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Mengingat hasil Survei Literasi Nasional (2017) menunjukan bahwa tingkat literasi keuangan di Indonesia sebesar 29.7%, terendah di Asia Tenggara.

Rendahnya tingkat literasi keuangan sangatlah mengkhawatirkan. Dampaknya bisa dirasakan pada lintas generasi. Para pakar sepakat bahwa literasi keuangan merupakan sebuah proses sosialisasi. Di sini tidak hanya menyangkut pengetahuan, namun juga terkait dengan kesadaran dalam menentukan pilihan. Untuk itu, seorang anak yang tumbuh dalam situasi yang perhatian terhadap literasi keuangan yang rendah, kemungkinan besar keahlian pengelolaan keuangannya pun tak jauh beda. Dengan rendahnya angka literasi keuangan di Indonesia, hampir bisa dipastikan akan berdampak pada 82 juta anak di Indonesia.

## Keluarga dan *Financial Behaviour*

Peran orang tua dalam mensosialisasikan literasi keuangan sangat penting. Mereka yang secara sadar memberikan pemahaman dan melibatkan anak dalam pengelolaan keuangan akan lebih bedampak lebih baik dibandingkan orang tua tidak melakukan sama sekali. Interaksi ekonomi yang diserap seorang anak akan menghasilkan financial knowledge.



Pengetahuan keuangan tidak serta merta berdampak dalam *financial behavior*. Untuk menciptakan perilaku sadar terhadap pengelolaan keuangan, orang tua perlu untuk menciptakan kebiasaan. Salah satu hal yang paling sederhana adalah mengajak anak berdiskusi antara pendapat, pengeluaran dan tabungan, kemudian diikuti dengan praktik. Anak diminta untuk mengelola uang jajan mereka yang dikaitkan dengan upaya memenuhi keinginan jangka panjang. Misalnya, bagi anak yang menginginkan

sepeda baru, dia diminta menghemat uang jajan mereka dan menabung. Pada waktu yang sama, anak diminta untuk merencanakan kapan mereka bisa membeli sepeda tersebut.

### Peran Menabung Bagi Anak

Menabung mempunyai dampak berarti pada perilaku keuangan anak. Penelitian Webly dan Nyhus membuktikan bahwa para remaja yang mempunyai rekening tabungan dalam jangka waktu lama akan lebih banyak mendapat pengalaman langsung pada pengelolaan keuangan. Penelitian itu juga menunjukkan bahwa anak-anak tersebut bisa lebih bijak menggunakan uang jajan mereka.

Di Uganda, studi Karimli dkk (2015) pada anak-anak yatim di sekolah dasar menunjukkan bahwa tabungan anak membantu mereka lebih percaya di sekolah. Tidak hanya itu, program tabungan anak juga bisa mendongkrak ekonomi keluarga, karena mampu memotong kebutuhan sekolah mereka. Kebiasaan menabung terbukti tidak ada kaitannya dengan kemampuan ekonomi keluarga. Anak-anak yang rajin menabung sebagian besar berasal dari keluarga yang sering mendukung dan melakukan sosialisasi keuangan, terlepas dari keluarga kaya atau miskin.



### Keuangan Inklusif

Program Keuangan Inklusif diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan untuk terciptanya kesejahteraan sosial. Program ini ditujukan untuk menjaring masyarakat di atas usia 15 tahun supaya terhubung ke lembaga keuangan formal. Targetnya, tahun 2019 tingkat keuangan inklusif harus mencapai angka 75%.

Ada tiga tahapan dalam mengkampanyekan program ini. Pertama adalah menjaring masyarakat untuk mengenal tabungan (gerakan menabung). Kedua memperkenalkan model pembayaran keuangan digital pada masyarakat yang sudah mempunyai tabungan. Terakhir, ketiga, adalah kemudahan dalam pemberian kredit dan fasilitas lainnya. Keuntungan yang dijanjikan dalam program ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi sehari-hari. Selain itu juga memberikan edukasi melalui simpan-pinjam yang lebih efektif dan bentuk perlindungan diri dan keluarga melalui asuransi.

### Catatan Akhir

Upaya untuk membiasakan anak menabung sejak usia dini terbukti memberikan dampak positif pada anak di masa depan. Mereka akan lebih lama mendapatkan sosialisasi keuangan yang di dalamnya mencakup pengetahuan dan perilaku terhadap pengelolaan keuangan. Dengan kebiasaan ini, secara tidak langsung akan mengantarkan anak pada pemahaman literasi keuangan. Selain itu, membiasakan anak menabung juga bagian dari pemenuhan dan penghormatan dari hak-hak anak.

Yang perlu direnungkan kemudian adalah, program menabung seperti apa yang cocok dengan anak-anak usia dini? Sedangkan kita tahu, program keuangan inklusif pemerintah belum menjangkau anak di bawah 15 tahun.



# EFEKTIFITAS AGEN BANK YANG MEMILIKI PERAN PENTING DALAM KEUANGAN INKLUSIF



Keberadaan layanan keuangan tanpa kantor atau branchless banking sudah dimulai sejak awal tahun 2013. Inovasi ini dilatar belakangi tujuan untuk memperluas layanan keuangan formal bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Lokasi yang jauh, persyaratan yang memberatkan, serta biaya menjadi alasan yang sering menghambat masyarakat membuka rekening tabungan.

Program branchless banking ini juga diperluas menjadi Layanan Keuangan Digital (LKD) yang dikembangkan oleh Bank Indonesia guna peningkatan aktivitas ekonomi berbasis teknologi. LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan/atau keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik, namun dengan menggunakan sarana teknologi antara lain mobile based maupun web based dan jasa pihak ketiga (agen), dengan target layanan masyarakat unbanked dan underbanked.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga meluncurkan program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) sebagai penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

Pihak yang menjadi agen bank sendiri dapat merupakan badan hukum maupun perseorangan, yang memiliki kegiatan usaha di lokasinya, seperti pemilik warung/toko kelontong. Lokasi agen bank sendiri tidak dibatasi, bisa di seluruh wilayah Indonesia, sampai di tingkat kelurahan atau desa dimana agen bertempat tinggal (bila perorangan) atau berlokasi usaha.

Salah satu layanan keuangan yang dapat disediakan melalui agen bank adalah pembukaan rekening tabungan

dengan karakteristik Basic Saving Account (BSA). Tabungan dengan karakter BSA ini tidak ada persyaratan batas minimum saldo maupun transaksi setor tunai. Dengan adanya BSA diharapkan dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin menabung dengan jumlah setoran sesuai kemampuannya.

Bahkan rekening BSA tidak dikenakan biaya, baik pembukaan rekening, administrasi bulanan, dan transaksi pengkreditan rekening. Sehingga diharapkan dapat menjawab keluhan masyarakat yang selama ini tidak memiliki rekening tabungan di bank karena alasan biaya mahal.

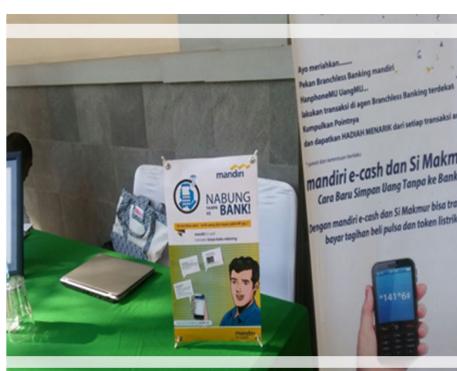
Berdasar Laporan OJK triwulan I tahun 2018, tercatat 779.919 agen Laku Pandai yang tersebar di 34 Provinsi dan 512 Kota/Kabupaten. Sementara itu, jumlah nominal dan nasabah tabungan BSA yang berhasil dihimpun masing-masing sebesar Rp 1,75 Triliun dan 19.294/764 nasabah.

Nominal tabungan BSA ini tumbuh 69,90% (qta) dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp 1,03 Triliun, yang dipengaruhi oleh adanya penarikan dana bantuan melalui program Bansos Non Tunai serta penambahan jumlah nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai.

Sedangkan agen bank program LKD mencapai 185.901 agen (s/d April 2018), dengan jumlah rekening uang elektronik teregister pada agen LKD sebanyak 2,5 juta (s/d April 2018).

Keberadaan agen bank diharapkan dapat menjadi salah satu strategi efektif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat di berbagai penjuru daerah. Letak geografis yang sulit dijangkau oleh kantor layanan perbankan, dapat diakomodir oleh agen bank yang sifatnya flexible dan tidak terikat jam kerja.

Tidak dapat dipungkiri agen bank yang bergerilya di berbagai penjuru wilayah Indonesia berperan penting dalam mendukung keuangan inklusif.



Sumber Gambar : Sekretariat DNKI



## DUKUNGAN PEMBIAYAAN KE SEKTOR PARIWISATA, PEMERINTAH RANCANG SKEMA KUR PARIWISATA

Semester kedua tahun 2018 dimulai dengan kondisi perekonomian global yang sedang bersiaga penuh mengantisipasi ancaman perang dagang yang dilontarkan AS kepada Tiongkok. Sesumbar yang terus dikeluarkan oleh Trump seakan menjadi peletuk gelombang dalam arus perekonomian global yang relatif stabil setahun ke belakang. Tiongkok yang terus menerima ancaman nyatanya juga tidak mau bertekuk lutut begitu saja kepada AS. Meskipun kedua negara ini juga sudah bertemu di meja negosiasi, serta penolakan dari pengusaha AS atas kebijakan tersebut, namun semua berakhir pada jalan buntu. Bukan Trump jika tidak mengeluarkan kebijakan yang kontroversial, maka tercatat perang dagang tersebut resmi diterapkan pada tanggal 6 Juli 2018. Resmi sudah fenomena uniteralisme dalam perdagangan bebas ini terjadi pertama kali di zaman modern.

Semua elemen bersiap, menyusun strategi untuk meminimalisir dampaknya kepada perekonomian dalam negeri. Terlebih perang dagang tersebut diikuti pula dengan intervensi kebijakan moneter The Fed yang menaikkan suku bunga acuan. Sungguh tantangan yang tidak mudah bagi keadaan perekonomian global.

Indonesia yang bukan pelaku utama perang dagang tersebut nyatanya juga menerima dampaknya. Ditambah kondisi neraca perdagangan RI yang defisit, sehingga perlu usaha lebih dari pemerintah untuk menyusun kebijakan. Sebagai respon atas kondisi tersebut, pemerintah Indonesia sedang menyusun kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan berfokus pada peningkatan ekspor dan pengendalian impor. Selain itu, pemerintah juga sedang memprioritaskan sektor pariwisata untuk menghasilkan devisa. Tercatat pada tahun 2016, sektor pariwisata mampu menjadi kontributor devisa terbesar kedua setelah CPO yaitu sebesar 13,568 miliar dollar AS.

Salah satu dukungan pemerintah kepada sektor pariwisata tersebut dituangkan dalam penyusunan skema pembiayaan di sektor pariwisata. KUR sebagai kredit program UMKM dengan suku bunga rendah, juga menjadi pilihan

alternatif skema pembiayaan yang ditawarkan pemerintah bagi pelaku usaha kecil di sektor pariwisata. Saat ini, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM bersama-sama dengan Kementerian Pariwisata dan Penyalur KUR sedang mempersiapkan skema KUR untuk sektor pariwisata. Nantinya, skema KUR ini akan difokuskan untuk pengembangan usaha pariwisata di 10 lokasi Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Skema KUR untuk sektor pariwisata ini diharapkan dapat segera ditetapkan dan diakses oleh masyarakat.

Di tengah ketidakstabilan perekonomian global, kinerja KUR sampai dengan Semester I Tahun 2018 mencatatkan capaian yang sangat positif. Berdasarkan data realisasi KUR yang dihimpun oleh sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, KUR telah disalurkan sebesar Rp 64,6 Triliun yaitu sebanyak 55,1% dari target penyaluran KUR tahun 2018. Agresivitas capaian KUR tersebut juga diikuti dengan terjaganya tingkat Non Performing Loan diangka 0,01%. Pemerintah juga berhasil menjaga dominasi porsi penyaluran KUR kepada usaha mikro. Hal tersebut tercermin dengan penyaluran KUR Mikro sebesar Rp 41 triliun yaitu 63,5% dari penyaluran KUR, diikuti dengan KUR Kecil sebesar Rp 23,3 Triliun yaitu 36,1% dari penyaluran KUR, dan KUR Penempatan TKI sebesar Rp 231 Miliar yaitu sebesar 0,4% dari penyaluran KUR. Kinerja ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil.

Pemerintah telah bertekad untuk mendorong penyaluran KUR ke sektor produksi, hal tersebut mengingat sektor produksi menjadi penggerak langsung perekonomian melalui usaha - usaha di sektor riil. Sampai dengan Semester I tahun 2018, capaian penyaluran KUR di sektor produksi sebesar 38,5% dari penyaluran KUR. Capaian ini memang masih jauh daripada target penyaluran KUR di sektor produksi yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar minimum 50% dari total penyaluran KUR. Dalam rangka mendorong optimalisasi penyaluran KUR di sektor produksi, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM

telah mengirimkan surat evaluasi penyaluran KUR sektor produksi kepada 17 Penyalur yang memiliki kinerja penyaluran KUR di sektor produksi masih di bawah 50%. Melalui surat tersebut, diharapkan Penyalur KUR dapat mempersiapkan rencana tindak untuk peningkatan penyaluran KUR di sektor produksi.

Selain itu, untuk optimalisasi penyaluran KUR tahun 2018, Komite Kebijakan juga telah mengirimkan surat evaluasi kepada 26 Penyalur KUR yang kinerja penyaluran KUR sampai dengan 30 Juni 2018 masih di bawah 50% dari target penyaluran KUR tahun 2018. Langkah tersebut diperlukan agar capaian penyaluran KUR dapat optimal sampai dengan akhir tahun 2018.

Kinerja penyaluran KUR masing – masing wilayah masih didominasi dengan penyaluran KUR di Pulau Jawa dengan porsi penyaluran sebesar 56,1%, diikuti dengan Sumatera 19,4% dan Sulawesi 9,4%. Distribusi penyaluran KUR tersebut bukanlah tanpa alasan, mengingat distribusi penduduk dewasa dan UMKM tertinggi juga berada di pulau – pulau tersebut. Provinsi Jawa Tengah masih menjadi provinsi dengan penyaluran KUR tertinggi yaitu sebesar Rp 11,8 Triliun, diikuti dengan Jawa Timur sebesar Rp 10,6 Triliun, dan Jawa Barat sebesar Rp 8,1 Triliun. Sedangkan untuk provinsi di luar Jawa dengan penyalu-

ran KUR tertinggi dicapai oleh provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 3,5 Triliun dan Sumatera Utara sebesar 2,5 Triliun.

Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM telah berupaya untuk sedikit demi sedikit melakukan pemerataan penyaluran KUR, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan penyaluran KUR kepada masyarakat di daerah perbatasan dan tertinggal. Upaya tersebut diperkuat pula dengan upaya untuk menambahkan Penyalur KUR, baik dari bank, lembaga keuangan bukan bank, dan koperasi. Diharapkan melalui upaya – upaya tersebut, rakyat semakin dekat dan dimudahkan untuk mengakses kredit program yang ditujukan memang untuk rakyat.

Seluruh tantangan baik dari luar maupun dari dalam negeri menjadi sumber inspirasi bagi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM untuk terus berupaya menyusun skema kredit/pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mampu menjadi instrument penggerak perekonomian nasional. Tentu dengan perhitungan dan analisa risiko yang komprehensif. Diharapkan, KUR sektor pariwisata ini mampu menjadi salah satu amunisi Indonesia dalam upaya menambah devisa serta menuju kemandirian pembiayaan untuk sektor pariwisata.

## REALISASI PENYALURAN KUR

### April 2018

Realisasi Penyaluran  
Jumlah Debitur

45.088.902.000.000  
1.709.104

### Mei 2018

Realisasi Penyaluran  
Jumlah Debitur

57.617.791.000.000  
2.201.005

### Juni 2018

Realisasi Penyaluran  
Jumlah Debitur

64.631.607.000.000  
2.454.968



## REALISASI KUR SEKTOR EKONOMI





# SimPel (Simpanan Pelajar) & Bank Sampah



Jakarta – Tim Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) pada hari Jum'at, 20 Juli 2018 mengadakan kunjungan ke SDN 08 Jelambar Pagi dalam rangka memantau pelaksanaan program Simpanan Pelajar (SimPel) yang diprakarsai oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ke datangan tim langsung disambut oleh Ibu Dormauli Aisyah selaku Kepala Sekolah.



Sumber Gambar : Sekretariat DNKI

Dormauli Aisyah mengaku senang dengan adanya tabungan Simpel. Para murid saat ini bisa mulai belajar menabung di bank sejak dini secara konsisten. Uang yang ditabung para murid bisa bersumber dari sisa uang jajan serta uang yang diperoleh dari penghasilan menjual sampah. Sampah yang dimaksud merupakan bagian dari program bank sampah yang selama ini digalakkan oleh sekolah dan para murid.

Program bank sampah di SDN 08 Jelambar Pagi meng himbau seluruh siswanya untuk membawa sampah baik organik maupun non-organik dari lingkungan rumahnya untuk kemudian dikumpulkan di sekolah. Kumpulan sampah tersebut kemudian dipilah dan dikemas dalam karung sesuai jenisnya serta ditimbang.

Setelah semua terkumpul, pihak Suku Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemkot Jakarta Barat akan membeli sampah-sampah Anorganik (terutama botol plastik) tersebut dengan harga Rp 1.000,-/kg s/d Rp 2.500,-/kg. Sementara sampah organik diolah menjadi kompos di lingkungan sekolah, untuk kemudian dijual kepada Suku Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemkot Jakarta Barat.

Melalui program bank sampah ini lah para murid mendapatkan tambahan uang untuk ditabung di tabungan Simpel. Seorang guru yang ditunjuk sebagai koordinator akan menuju ke kantor bank yang sudah menjadi rekanan SDN 08 Jelambar Pagi untuk menyetorkan uang hasil penjualan sampah. Kemudian pihak bank akan memasukkan uang tersebut ke rekening tabungan SimPel masing-masing siswa sesuai dengan jumlah sampah yang dibawa.

Setiap bulannya SDN 08 Jelambar melakukan setoran kolektif kepada lebih dari 400 rekening siswanya, dengan kisaran 6 sampai 7 juta rupiah. Hal ini tentunya sangatlah potensial untuk dikembangkan dan dikelola oleh pihak perbankan.

Pada tahun ajaran baru ini kepala sekolah SDN 08 Jelambar bahkan sudah "mewajibkan" 64 orang siswa baru kelas 1 untuk membuka SimPel. Cara yang dilakukan adalah dengan mengajak orang tua siswa baru secara persuasif untuk mendukung program bank sampah dan tabungan SimPel.

SimPel sendiri merupakan rekening tabungan yang secara khusus diperuntukkan kepada kelompok pelajar. Nasabah tabungan SimPel ini bisa mulai dari anak usia PAUD sampai tingkat SMA. Presiden Joko Widodo sendiri yang meluncurkan Simpel pada tanggal 15 Juni 2015. Sebagai sebuah produk perbankan, SimPel merupakan inisiatif yang sangat penting dalam mendukung pencapaian keuangan inklusif.



## “ Membuat Anak Bangga Punya Tabungan dengan SimPel ”

Program Simpanan Pelajar atau yang lebih dikenal dengan nama SimPel/SimPel iB (syariah) merupakan pengembangan produk tabungan oleh industri perbankan yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri perbankan untuk mendorong budaya menabung sejak dini dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan. SimPel/SimPel iB diperuntukkan bagi seluruh pelajar di Indonesia mulai dari PAUD sampai dengan SMA atau sederajat dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik. SimPel/SimPel iB diluncurkan secara resmi oleh Presiden RI pada tanggal 15 Juni 2015.

Menurut Sondang Martha Samosir selaku Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK, pengembangan produk SimPel/SimPel iB berawal dari adanya kebutuhan produk keuangan berupa tabungan dengan karakteristik dan fitur yang sesuai dengan kebutuhan kelompok pelajar/siswa yang juga merupakan salah satu sasaran keuangan inklusif sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No.82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).



Sumber Gambar : Sekretariat DNKI

“Program SimPel/SimPel iB diharapkan mampu menjadi media edukasi bagi siswa” ungkap Sondang. Para siswa dapat mengenal berbagai produk perbankan dan dapat mendorong budaya menabung termasuk melatih penge-lolaan keuangan sejak dini. Setelah siswa tersebut matang dalam bertransaksi, diharapkan mereka dapat meng-gunakan produk perbankan secara bijaksana, misalnya menggunakan dana tabungan untuk membeli keperluan sekolah.

Sondang mengungkapkan jika fitur yang menarik dari tabungan SimPel/SimPel iB ternyata membuat para siswa merasa bangga karena memiliki tabungan di bank atas namanya sendiri, “anak bangga kalau punya tabungan, bukan lagi bangga punya mainan atau handphone”. Siswa menjadi semakin rajin untuk menabung dan senang jika

melihat saldo-nya terus meningkat. Selain itu, para siswa juga terlatih dalam mengelola keuangan, bahkan sangat bangga jika bisa membeli sesuatu dengan tabungannya sendiri.

Proses pembukaan tabungan SimPel/SimPel iB dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui sekolah yang telah bekerja sama dengan bank peserta SimPel/SimPel iB atau mendatangi langsung ke kantor cabang bank peserta SimPel/SimPel iB. Dokumen yang perlu diper-siapkan adalah fotokopi akta lahir anak, kartu keluarga, dan KTP orang tua.

Industri perbankan sangat berperan penting dalam menyuksekan program SimPel/SimPel iB. Salah satunya ditunjukkan melalui program edukasi, kerja sama, dan akuisisi SimPel/Simpel iB di sekolah-sekolah dari Sabang sampai Merauke. Kegiatan yang dilakukan oleh industri perbankan tersebut bertujuan untuk mendorong kegiatan pembukaan rekening oleh siswa serta mema-syarakatkan produk SimPel/SimPel iB kepada komunitas sekolah, orang tua, dan instansi pendidikan. Hal ini tentu mendukung program pemerintah dalam rangka keuangan inklusif. Bahkan sebagai bentuk sinergi antara kementeri-an/lembaga dan untuk mendukung program pemerintah, SimPel/SimPel iB saat ini telah digunakan untuk penyalu-ran bantuan sosial Program Indonesia Pintar (PIP) kepa-d seluruh pelajar di Indonesia.

Selain itu, OJK juga akan terus mendorong partisipasi seluruh bank agar dapat turut serta menjadi bank peserta SimPel/SimPel iB dan memasyarakatkan produk SimPel/ Simpel iB kepada siswa sekolah. Sondang menuturkan sampai saat ini sudah ada 280 bank yang berpartisipasi dalam program SimPel/SimPel iB yang terdiri dari Bank Umum, Bank Pembangunan Daerah, dan Bank Perkreditan Rakyat (baik konvensional maupun syariah).

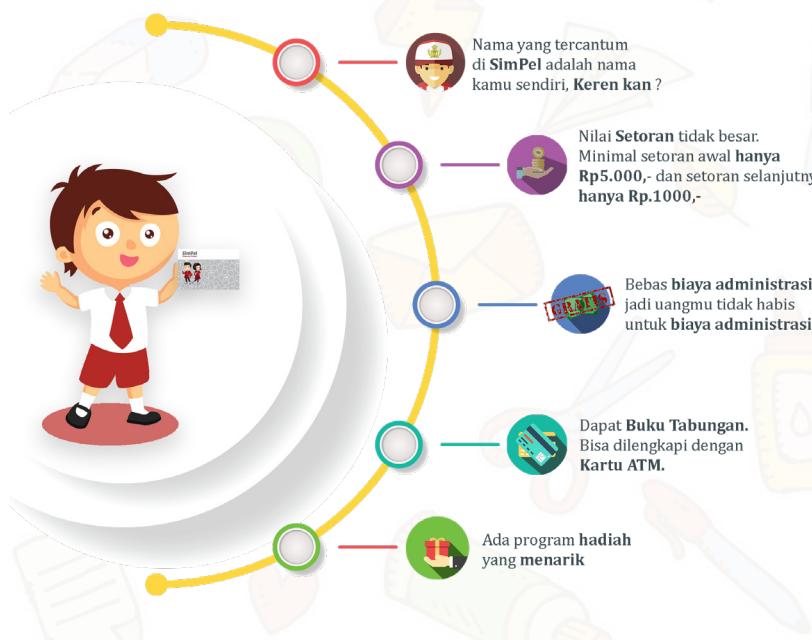
Kedepan, OJK bersama dengan Kementerian/Lemba-ga terkait serta industri perbankan berkomitmen untuk menjadikan program SimPel/SimPel iB sebagai program nasional sehingga diharapkan nantinya setiap siswa di seluruh Indonesia mempunyai rekening tabungan. OJK juga terus mendorong perbankan untuk secara aktif memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa di In-donesia, seperti menjalankan mobil layanan gerak atau mendatangkan petugas bank ke sekolah-sekolah. OJK juga sedang mempersiapkan kegiatan kampanye bersama program SimPel/SimPel iB secara masif dan berkesinam-bungan dengan Pokja Edukasi Keuangan pada Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Dengan adanya program SimPel/SimPel iB sebagai program nasional, diharapkan tidak hanya dapat menciptakan budaya menabung sejak dini namun juga dapat meningkatkan akses keuangan di Indonesia sehingga target inklusi keuangan sesuai SNKI sebesar 75% pada tahun 2019 dapat tercapai.

# SimPel

## Simpanan Pelajar

### Fitur-fitur SimPel

Cocok untuk para pelajar PAUD, TK / RA, SD / MI, SMP / MTs, SMA / MA atau sederajat



### Bagaimana Cara Membuka SimPel ?

- 
- 01 Copy Kartu Pelajar
  - 02 Surat Keterangan dari sekolah
  - 03 Copy Akte Kelahiran
  - 04
    - Copy KTP
    - Surat satu orang tua
    - Surat Persetujuan dari orang tua

## SUSUNAN REDAKSI



Dewan Nasional Keuangan Inklusif merupakan Koordinator Bagi Kelompok Kerja dan Sekretariat SNKI Guna Mewujudkan Keuangan Inklusif di Indonesia

Pemimpin Redaksi : Iskandar Simorangkir  
Redaktur Pelaksana : A. Heri Susanto  
Redaktur : Eni Widiyanti

Editor : Rissalwan Habdy Lubis  
Desain Grafis : Aan Khunaifi

Penulis : 1. Juwita Lukytasari Putri  
2. R. Yudha Triatanto W

**Cowel Tower Lantai 7**  
Jl. Senen Raya No. 135, Jakarta Pusat 10410  
E-mail : sekretariat.dnki@ekon.go.id  
Telp/Fax : (021) 3450190 / (021) 3450214

Dewan Nasional Keuangan Inklusif  
 @keuanganinklusif  
 keuangan\_inklusif  
 Official Dewan Nasional Keuangan Inklusif